

Policy Brief

Sistem Baku Pelibatan Masyarakat untuk Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Wilayah Pedesaan

(Community Engagement Standard System for
Accelerating Digital Transformation of Public
Services in Rural Areas)

ADVOCATE

Aldi Muhammad Alizar

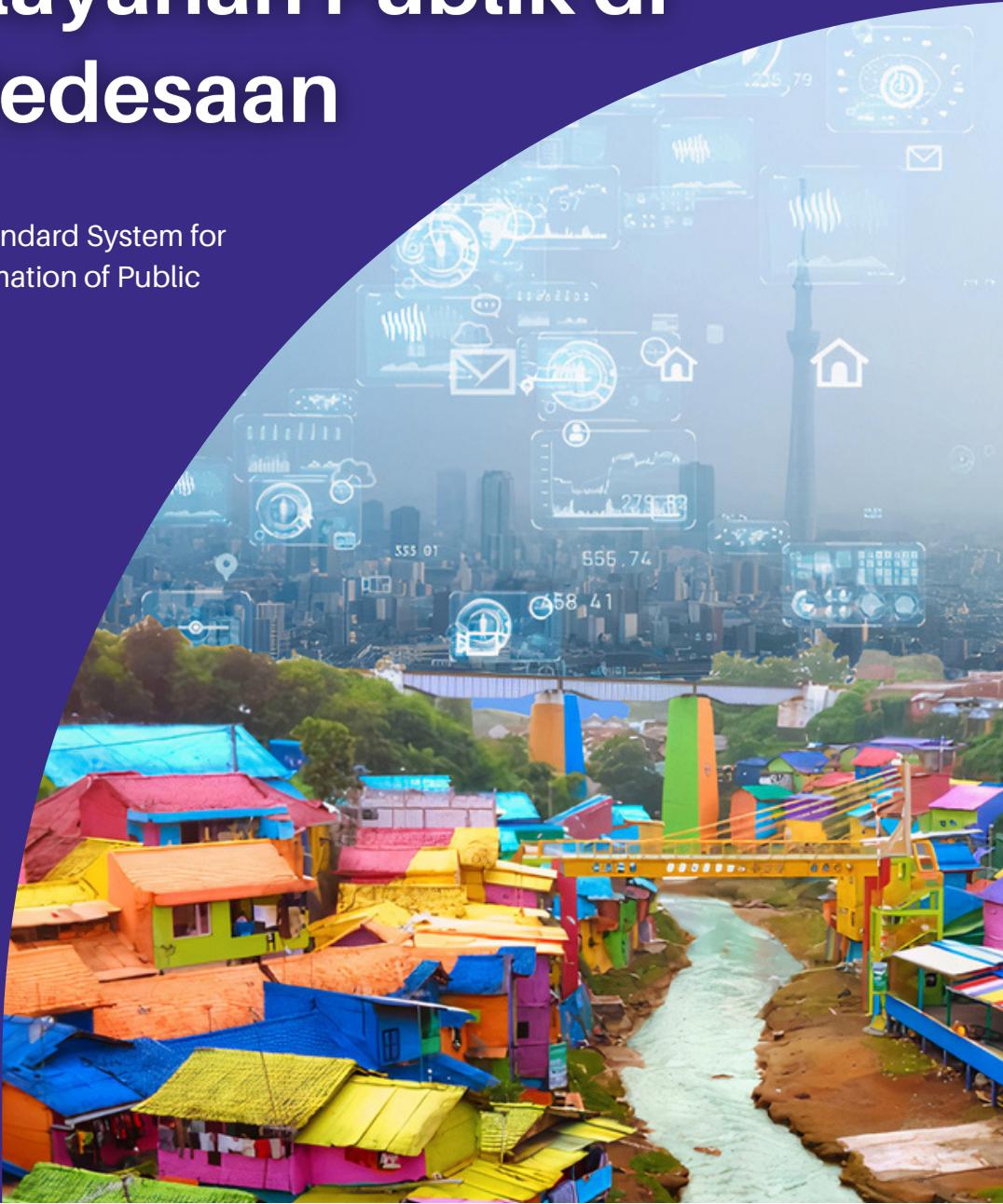
COORDINATOR

Mohammad Berli

COMPILEMENT TEAM

Balqis Mira Firdausy
Muhammad Rizki Ramadhan

September
2023



Ringkasan

Perumusan Sistem Baku dalam bentuk peraturan perundangan merupakan pendekatan terkemuka untuk mendorong transformasi digital pelayanan publik di wilayah pedesaan Indonesia. Meskipun demikian, di tengah upaya pelaksanaan pembangunan dan agenda negara, terutama dalam konteks pelayanan publik, pelibatan masyarakat masih terjebak dalam formalitas semata. Oleh karena itu, melalui policy brief ini, IAP2 mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebuah pendekatan yang lebih proaktif dengan merumuskan sistem baku pelibatan masyarakat guna memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik di wilayah pedesaan.

Summary

The formulation of the Baku System in the form of legislation is a leading approach to encourage the digital transformation of public services in rural Indonesia. However, in the midst of efforts to implement the country's development and agenda, especially in the context of public services, community engagement is still trapped in mere formality. Therefore, through this policy brief, IAP2 proposes to the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo) a more proactive approach by formulating a standardized system of community engagement to strengthen digital transformation in public services in rural areas.

Rekomendasi

Melalui policy brief ini, IAP2 menyampaikan rekomendasi kepada Kominfo yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan transformasi digital dalam pelayanan publik, diperlukan upaya yang lebih efektif melalui: 1) **penguatan sinergi dan kolaborasi antar kementerian** yang berkaitan; 2) **peningkatan literasi serta kesiapan masyarakat** terhadap transformasi digital pelayanan; 3) **melibatkan pihak swasta** dalam investasi transformasi digital; dan 4) **merumuskan sistem baku** untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Recommendation

Through this policy brief, IAP2 submits recommendations to Kominfo that can be considered to improve digital transformation in public services, more effective efforts are needed through: 1) **strengthening synergy and collaboration** between related ministries; 2) **increasing literacy and community** readiness for digital transformation of services; 3) **involving the private sector** in digital transformation investments; and 4) **formulating a standardized system** for involving the community in every stage of development.

Latar belakang

Pemerintah di seluruh dunia telah menyadari potensi besar teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik. Di Indonesia, transformasi digital pelayanan publik telah menjadi fokus utama pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Transformasi digital menjadi langkah inovatif dan adaptif yang diperlukan guna mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkualitas. Konsep pelayanan publik menempatkan masyarakat sebagai target utama, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks transformasi digital, percepatan digitalisasi harus didorong melalui transformasi masyarakat itu sendiri. Namun, tantangan aksesibilitas yang masih belum optimal, terutama di wilayah pedesaan Indonesia, menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dan upaya yang lebih intensif dalam mempercepat transformasi digital pelayanan publik di wilayah pedesaan. Melibatkan masyarakat merupakan kunci dari setiap pelaksanaan pembangunan. Namun, terkadang hal ini masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Terutama dalam aspek digitalisasi, literasi dan kesiapan masyarakat Indonesia masih terbilang rendah di wilayah pedesaan. Maka dari itu, pertanyaannya, bagaimana sebenarnya percepatan transformasi pelayanan publik di wilayah pedesaan dapat terwujud?

Background

Governments around the world have realized the great potential of digital technology in improving the efficiency, transparency, and accessibility of public services. In Indonesia, digital transformation of public services has become the main focus of national development, as stated in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Digital transformation is an innovative and adaptive step needed to achieve better and quality development. The concept of public services places the community as the main target, so it needs to be tailored to their needs. In the context of digital transformation, the acceleration of digitalization must be driven through the transformation of society itself. However, the challenge of accessibility, which is still not optimal, especially in rural Indonesia, is a major concern. Therefore, special attention and more intensive efforts are needed to accelerate the digital transformation of public services in rural areas. Involving the community is the key to any development implementation. However, sometimes this still lacks adequate attention from the government. Especially in the aspect of digitalization, the literacy and readiness of Indonesian society is still relatively low in rural areas. Therefore, the question is, how exactly can the acceleration of public service transformation in rural areas be realized?

Hasil dan Temuan

Literasi dan Kesiapan Masyarakat Masih Rendah

Transformasi digital membutuhkan tidak hanya infrastruktur yang siap, tetapi juga sumber daya manusia yang terampil dan pemahaman mendalam masyarakat terhadap urgensi transformasi digital. Sayangnya, di Indonesia, tantangan utama dalam percepatan transformasi digital adalah tingkat literasi dan kesiapan masyarakat. Menurut laporan Institute for Development Management (IMD) dalam World Digital Competitiveness, Indonesia berada di peringkat ke-51 dari 63 negara dalam hal digitalisasi. IMD menggunakan tiga faktor penilaian, yaitu pengetahuan (knowledge), teknologi (technology), dan kesiapan masa depan (future readiness) untuk menilai kemajuan digitalisasi di Indonesia (IMD, 2022).

Dari hasil pemetaan penilaian skema di atas, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 63 negara dalam hal pengetahuan tentang digitalisasi, menunjukkan pemahaman yang masih rendah terhadap digitalisasi. Selain itu, kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan dan mengadopsi transformasi digital juga masih tergolong rendah, dengan peringkat ke-52. Meskipun terdapat kemajuan dalam faktor teknologi yang membuat Indonesia naik ke peringkat ke-45 dari peringkat sebelumnya yaitu ke-49, tetapi hal ini tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa mengenai pentingnya transformasi digital dalam kehidupan mereka tetap rendah (Dermawan, 2023).

Results and Findings

Literacy and Community Readiness Are Still Low

Digital transformation requires not only ready infrastructure, but also skilled human resources and a deep understanding of the urgency of digital transformation. Unfortunately, in Indonesia, the main challenge in accelerating digital transformation is the level of literacy and readiness of the community. According to the Institute for Development Management (IMD) report in World Digital Competitiveness, Indonesia is ranked 51st out of 63 countries in terms of digitalization. IMD uses three assessment factors, namely knowledge, technology, and future readiness to assess the progress of digitalization in Indonesia (IMD, 2022). From the results of the mapping assessment scheme above, Indonesia is ranked 60th out of 63 countries in terms of knowledge about digitalization, indicating a low understanding of digitalization. In addition, Indonesia's readiness to utilize and adopt digital transformation is also low, ranking 52nd. While advancements in technological factors have seen Indonesia move up to 45th from its previous rank of 49th, this cannot ignore the fact that rural communities' knowledge and awareness of the importance of digital transformation in their lives remains low (Dermawan, 2023).

Akses Digital Belum Merata

Akses digital di pedesaan juga masih menjadi kendala utama yang menghambat percepatan transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Kesenjangan aksesibilitas teknologi digital di wilayah pedesaan masih sangat signifikan, dengan keterbatasan akses internet dan perangkat yang memadai. Termasuk kesiapan infrastruktur digital yang menjadi tantangan tersendiri dalam transformasi digital pelayanan publik (Arlinta, 2023).

Hal tersebut mengakibatkan masyarakat pedesaan menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan pelayanan publik yang tersedia secara digital serta akses terhadap informasi dan layanan penting lainnya. Sebagai contoh, di Sulawesi Tengah, sebanyak 850 desa belum memiliki akses digital yang mencakup internet dan perangkat yang memadai, hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Mohammad Nadir (CNN Indonesia, 2022). Situasi serupa juga terjadi di Jawa Barat, di mana terdapat 1.062 desa yang belum memiliki akses internet (Herdiana, 2023).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya disparitas persentase pemanfaatan digitalisasi antara masyarakat kota dan desa dari tahun ke tahun, sebelumnya pada tahun 2021, data terakhir menunjukkan bahwa pemanfaatan digital di masyarakat kota mencapai 71,81%, sedangkan di masyarakat desa hanya mencapai 49,30% yang jauh di bawah tingkat penetrasi internet di perkotaan (Natanegara, 2023).

Uneven Digital Access

Digital access in rural areas is also still a major obstacle that hinders the acceleration of digital transformation of public services in Indonesia. The digital technology accessibility gap in rural areas is still very significant, with limited internet access and adequate devices. Including the readiness of digital infrastructure which is a challenge in the digital transformation of public services (Arlinta, 2023).

This results in rural communities facing difficulties in utilizing digitally available public services and access to information and other important services. For example, in Central Sulawesi, as many as 850 villages do not have digital access that includes internet and adequate devices, this was revealed by the Head of the Community and Village Empowerment Office, Mohammad Nadir (CNN Indonesia, 2022). A similar situation also occurs in West Java, where there are 1,062 villages that do not have internet access (Herdiana, 2023).

Data from the Central Statistics Agency (BPS) shows a disparity in the percentage of digitalization utilization between urban and rural communities from year to year, previously in 2021, the latest data showed that digital utilization in urban communities reached 71.81%, while in rural communities it only reached 49.30%, which is far below the level of internet penetration in urban areas (Natanegara, 2023).

Ida Widianingsih, seorang Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, menekankan perlunya mengangkat aksesibilitas masyarakat desa terhadap teknologi digital sebagai hak yang diperjuangkan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah (Herdiana, 2023).

Ketidakhadiran Sistem Baku Pelibatan Masyarakat Desa

Ketidakhadiran kerangka sistem baku yang konkret untuk melibatkan masyarakat desa dalam proses transformasi digital pelayanan publik telah secara signifikan menghambat pencapaian kemajuan optimal. Peran sebuah peraturan perundangan sangat sentral karena mencakup hak, peran, dan kewajiban masyarakat. Dalam konteks transformasi digital pelayanan publik di pedesaan, mengarah pada proses pembangunan yang lebih luas. Tanpa panduan yang tegas, partisipasi masyarakat desa sering kali mengalami keraguan dan kurang arah, yang pada akhirnya membawa ketidakpastian yang merentang dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program. Pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu, Indonesia memiliki jumlah peraturan yang mencapai 42.161 berdasarkan laporan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), hanya sejumlah kecil yang secara khusus mengatur pelibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan dan kebijakan.

Ida Widianingsih, a Professor at the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) of Padjadjaran University, emphasizes the need to elevate the accessibility of rural communities to digital technology as a right that is fought for and requires serious attention from the government (Herdiana, 2023).

Absence of a Standardized System for Village Community Engagement

The absence of a concrete, standardized system framework for involving village communities in the digital transformation process of public services has significantly hindered the achievement of optimal progress. The role of legislation is central as it covers the rights, roles and obligations of the community. In the context of digital transformation of public services in rural areas, it leads to a broader development process. Without firm guidance, village community participation often suffers from indecision and lack of direction, which in turn brings uncertainty that spans from the planning, implementation, and evaluation stages of the program. As of August 18, 2022, Indonesia has a total of 42,161 regulations according to a report from the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham), only a small number of which specifically regulate the involvement of village communities in development and policy processes.

Bahkan dalam regulasi-regulasi perundangan yang ada, fokus pada partisipasi masyarakat desa masih terbatas pada satu pasal. Terlebih lagi, meskipun terdapat dua pasal dalam UUD 1945 yang secara tersirat merujuk pada partisipasi, pandangan dari peneliti senior di Pusat Studi Konstitusi (Pusako) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat desa dalam berpartisipasi masih menciptakan ambiguitas yang perlu dipecahkan (Hidayat, 2022).

Implikasi dan Rekomendasi

Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi

Transformasi digital di Indonesia masih membutuhkan perhatian khusus, selain pada konteks literasi, kesiapan, dan aksesibilitas dari masyarakat. Transformasi digital di Indonesia merupakan agenda pembangunan yang pada dasarnya melibatkan berbagai pihak. Kominfo perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya, seperti penyusunan RPJMN 2020-2024, Skema Integrasi Layanan Digital, dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, upaya-upaya tersebut masih bersifat sentralistik dan terfokus pada satu kementerian dan lembaga tertentu.

Even in existing laws and regulations, the focus on village community participation is limited to one article. Moreover, although two articles in the 1945 Constitution implicitly refer to participation, the views of senior researchers at the Center for Constitutional Studies (Pusako) reveal that the lack of clarity regarding the rights and responsibilities of village communities in participating still creates ambiguities that need to be resolved (Hidayat, 2022).

Implications and Recommendations

Strengthening Synergy and Collaboration

Digital transformation in Indonesia still requires special attention, in addition to the context of literacy, readiness, and accessibility of the community. Digital transformation in Indonesia is a development agenda that basically involves various parties. Kominfo needs to strengthen synergy and collaboration with other ministries and institutions. The Indonesian government has made several efforts, such as the preparation of the 2020-2024 RPJMN, the Digital Service Integration Scheme, and the Public Service Mall (MPP). However, these efforts are still centralized and focused on one particular ministry and institution.

Dalam mengatasi hal tersebut, Kominfo dapat mendorong pembentukan forum atau kelompok kerja lintas sektor kementerian yang tersistem melalui sebuah platform untuk pertukaran pengetahuan, ide, dan langkah strategis ke depan. Selain itu, infrastruktur digital yang terintegrasi antar lembaga dan kementerian dapat membantu mendapatkan data nasional yang mencakup masukan dan kritik dari masyarakat terkait program-program yang dikembangkan oleh lembaga dan kementerian tersebut.

Dalam transformasi digital pelayanan publik, beberapa kementerian seperti Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bertanggung jawab dalam pelayanan pemerintahan nasional. Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bertanggung jawab dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta percepatan pembangunan desa. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bertanggung jawab dalam kebijakan perencanaan pembangunan, termasuk anggaran dan sarana prasarana dapat meningkatkan kinerjanya berbarengan dengan Kominfo sendiri yang menjadi penyelenggara utama dalam transformasi digital pelayanan publik.

In overcoming this, Kominfo can encourage the formation of a forum or working group across ministerial sectors that is systemized through a platform for exchanging knowledge, ideas, and strategic steps going forward. In addition, an integrated digital infrastructure between institutions and ministries can help obtain national data that includes input and criticism from the public regarding the programs developed by these institutions and ministries.

In the digital transformation of public services, several ministries such as the Ministry of State Apparatus and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB) are responsible for national government services. The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendes PDTT) is responsible for village development, empowerment of village communities, and acceleration of village development. The Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Ministry of PPN/Bappenas) is responsible for development planning policies, including budgets and infrastructure can improve its performance along with Kominfo itself, which is the main organizer in the digital transformation of public services.

Meningkatkan Literasi dan Kesiapan Masyarakat Desa

Dalam era transformasi digital pelayanan publik, peningkatan literasi dan kesiapan masyarakat desa bukan sekadar opsi, melainkan menjadi langkah krusial yang tak terelakkan dalam mengatasi kesenjangan akses digital. Lebih dari itu, hal ini menjadi pondasi utama dalam mempercepat pelaksanaan transformasi digital di wilayah pedesaan. Tujuan besar transformasi digital untuk pedesaan umumnya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi berbagai aktivitas di pedesaan, meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan kesetaraan digital antara perkotaan dan pedesaan. Terutama dalam konteks pelayanan publik.

Oleh karena itu, Kominfo dapat mengadakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan melalui pengembangan program-program yang membantu dan mendorong masyarakat desa dalam meningkatkan kemampuannya dalam pemanfaatan digital. Misalnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam mendorong literasi media melalui sebuah pembentukan komunitas bernamakan "Community Media Foundation (CMF)". Melalui CMF tersebut, terdapat setidaknya empat misi yang diemban yaitu memperkuat pemahaman publik mengenai media melalui pendidikan media, memperluas kreativitas publik, serta mendorong keterlibatan publik dalam produksi.

Improving Village Community Literacy and Readiness

In the era of digital transformation of public services, increasing the literacy and readiness of rural communities is not just an option, but an inevitable crucial step in overcoming the digital access gap. More than that, this is the main foundation in accelerating the implementation of digital transformation in rural areas. The big goal of digital transformation for rural areas is generally to increase the productivity and efficiency of various activities in rural areas, improve the quality of life, and increase digital equality between urban and rural areas. Especially in the context of public services.

Therefore, Kominfo can conduct continuous education and training programs through the development of programs that help and encourage rural communities to improve their ability to use digital. For example, the South Korean government encourages media literacy through the establishment of a community called the "Community Media Foundation (CMF)". Through the CMF, there are at least four missions carried out, namely strengthening public understanding of the media through media education, expanding public creativity, and encouraging public involvement in production.

Pada akhirnya, CMF menjadi platform yang menghubungkan publik dengan media (Natalia, 2022). Kemudian selain itu, Kominfo juga dapat meningkatkan akses terhadap informasi melalui kampanye, program radio lokal, atau media lain yang dapat dijangkau masyarakat desa.

Dalam kontes transformasi digital pelayanan publik, Kominfo dapat bekerja sama dengan Kemendes PDTT dalam aspek pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam program peningkatan literasi digital. Selain itu Kominfo juga dapat mengandalkan peran para tokoh masyarakat setempat, mulai dari kepala desa maupun local champion.

Ultimately, CMF becomes a platform that connects the public with the media (Natalia, 2022). In addition, Kominfo can also increase access to information through campaigns, local radio programs, or other media that can be reached by rural communities.

In the contest of digital transformation of public services, Kominfo can work with the Ministry of Villages in the aspect of community empowerment to participate in digital literacy improvement programs. In addition, Kominfo can also rely on the role of local community leaders, starting from the village head and local champions.

Melibatkan Partisipasi Pihak Swasta

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia acapkali dihadapi tantangan sumber daya manusia dan keuangan. Akses digital yang belum merata merupakan tugas besar yang tidak hanya sekedar membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, melainkan sumber daya keuangan menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Kominfo perlu melibatkan partisipasi pihak swasta dapat menjadi motor penggerak yang kuat dalam meningkatkan literasi dan kesiapan masyarakat desa terhadap transformasi digital. Dukungan finansial dan sumber daya dari sektor swasta dapat mempercepat implementasi program-program pendidikan, pelatihan, dan akses teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Involving Private Party Participation

The implementation of development in Indonesia is often faced with human and financial resource challenges. Uneven digital access is a big task that not only requires competent human resources, but financial resources are one that needs to be considered. Therefore, Kominfo needs to involve the participation of the private sector, which can be a strong driving force in improving the literacy and readiness of rural communities for digital transformation. Financial support and resources from the private sector can accelerate the implementation of education, training, and technology access programs that are relevant to the needs of rural communities.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia acapkali dihadapi tantangan sumber daya manusia dan keuangan. Akses digital yang belum merata merupakan tugas besar yang tidak hanya sekedar membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, melainkan sumber daya keuangan menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Kominfo perlu melibatkan partisipasi pihak swasta dapat menjadi motor penggerak yang kuat dalam meningkatkan literasi dan kesiapan masyarakat desa terhadap transformasi digital. Dukungan finansial dan sumber daya dari sektor swasta dapat mempercepat implementasi program-program pendidikan, pelatihan, dan akses teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sejumlah pengamat ekonomi menilai perlu adanya kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mengakselerasikan transformasi digital. Development of Economic and Finance (INDEF) menilai dalam upaya percepatan transformasi digital butuh pembangunan infrastruktur digital yang masih. Fakta perihal akses digital yang belum merata salah satunya juga karena infrastruktur yang belum memadai. Lanjutnya, jika hanya mengandalkan dana APBN tidak akan cukup. Pemerintah harus mengajak bahkan melibatkan pihak swasta. Demikian pula yang disampaikan oleh lembaga riset Praus Capital, menilai percepatan transformasi digital dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat disesuaikan dengan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 milik Kominfo (Kurniawan, 2022).

The implementation of development in Indonesia is often faced with human and financial resource challenges. Uneven digital access is a big task that not only requires competent human resources, but financial resources are one that needs to be considered. Therefore, Kominfo needs to involve the participation of the private sector, which can be a strong driving force in improving the literacy and readiness of rural communities for digital transformation. Financial support and resources from the private sector can accelerate the implementation of education, training, and technology access programs that are relevant to the needs of rural communities.

Number of economic observers assess the need for government and private collaboration to accelerate digital transformation. Development of Economic and Finance (INDEF) assesses that accelerating digital transformation requires the development of digital infrastructure. The fact that digital access is uneven is also due to inadequate infrastructure. He continued, if you only rely on APBN funds, it will not be enough. The government must invite and even involve the private sector. Similarly, the research institute Praus Capital assessed that the acceleration of digital transformation with collaboration between the government and the private sector can be adjusted to Kominfo's 2021-2024 Digital Indonesia Roadmap (Kurniawan, 2022).

Merumuskan Sistem Baku Pelibatan Masyarakat Desa

Perumusan sistem baku, yang dalam hal ini merujuk pada peraturan perundangan, memegang peranan krusial dalam mengokohkan sebuah keputusan. Ketika berbicara tentang partisipasi publik di tingkat desa, penting untuk menghadirkan sistem baku pelibatan masyarakat yang mencerminkan komitmen tulus terhadap partisipasi yang aktif dan berkesinambungan dari seluruh komponen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Maka dari itu, inisiatif Kominfo dalam merumuskan sistem baku pelibatan masyarakat di tingkat desa menjadi manifestasi konkret dalam mendorong partisipasi masyarakat desa, terutama dalam mengakselerasi transformasi digital dalam layanan publik. Dalam penyusunan sistem ini, beberapa aspek penting dapat dimasukkan, seperti: 1) Pengklarifikasi peran serta tanggung jawab masyarakat desa; 2) Klasifikasi hak dan kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi; serta 3) Panduan serta prosedur yang jelas untuk berpartisipasi, termasuk kemungkinan sanksi dan batasan dalam situasi tertentu.

Selama proses perumusan ini, Kominfo untuk menjalin kerja sama dengan Kemendes PDTT, yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi pedesaan, kebutuhan masyarakat desa, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan realitas di lapangan.

Formulating a Standard System for Village Community Involvement

The formulation of a standardized system, which in this case refers to laws and regulations, plays a crucial role in solidifying a decision. When talking about public participation at the village level, it is important to present a standardized system of community engagement that reflects a genuine commitment to the active and continuous participation of all components of society in the decision-making process. Therefore, Kominfo's initiative in formulating a standardized system of community engagement at the village level is a concrete manifestation in encouraging village community participation, especially in accelerating digital transformation in public services. In the preparation of this system, several important aspects can be included, such as: 1) Clarification of the roles and responsibilities of village communities; 2) Classification of the rights and obligations of the community in participating; and 3) Clear guidelines and procedures for participation, including possible sanctions and limitations in certain situations.

During this formulation process, the MOCI is working closely with the Ministry of Villages, which has a deep understanding of rural conditions, the needs of village communities, and the ability to adapt to realities on the ground.

Reference

- Arlinta, D. (2023, Maret 3). Kesiapan Infrastruktur dan Literasi Jadi Tantangan Digitalisasi Kesehatan. Retrieved Agustus 7, 2023, from kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/02/kesiapan-infrastruktur-dan-literasi-jadi-tantangan-digitalisasi-kesehatan>
- CNN Indonesia. (2022, Mei 21). Akses Belum Merata, 850 Desa di Sulteng Belum Bisa Rasakan Internet Baca artikel CNN Indonesia "Akses Belum Merata, 850 Desa di Sulteng Belum Bisa Rasakan Internet" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220520140503-192-798999/ak>. Retrieved Agustus 7, 2023, from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220520140503-192-798999/akses-belum-merata-850-desa-di-sulteng-belum-bisa-rasakan-internet>
- Dermawan, H. D. (2023, April 27). Transformasi Digital di Desa Tertinggal: Peran Pemerintah dalam Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi. Retrieved Agustus 7, 2023, from sohib.indonesiabaik.id: <https://sohib.indonesiabaik.id/article/transformasi-digital-di-desa-tertinggal-peran-pemerintah-dalam-mempercepat-pemerataan-infrastruktur-telekomunikasi-b9R61>
- Herdiana, I. (2023, Juli 5). Akses Internet di Jawa Barat tidak Merata Anak-anak Sekolah Merana. Retrieved Agustus 7, 2023, from bandungbergerak.id: <https://bandungbergerak.id/article/detail/15777/akses-internet-di-jawa-barat-tidak-merata-anak-anak-sekolah-merana>
- Hidayat, R. (2022, Januari 10). Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan. Retrieved Agustus 7, 2023, from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-partisipasi-masyarakat-lt61dbe4558bb38/?page=2>
- IMD. (2022). World Digital Competitiveness Ranking 2022. Institute Management Development.
- Kurniawan, A. (2022, Agustus 24). Transformasi Digital Butuh Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Rabu, 24 Agustus 2022 - 21:06 WIB oleh Anto Kurniawan dengan judul "Transformasi Digital Butuh Kolaborasi Pemerintah dan Swasta". Untu. Retrieved Agustus 7, 2023, from ekbis.sindonews.com: <https://ekbis.sindonews.com/read/865893/34/transformasi-digital-butuh-kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-1661386106>

Natalia, D. L. (2022, Juni 14). Mendorong literasi media di Korsel lewat "Community Media Foundation". Retrieved Agustus 7, 2023, from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/2937941/mendorong-literasi-media-di-korsel-lewat-community-media-foundation>

Natanegara, A. H. (2023, Juli 6). Mungkinkah Perdesaan Kejar Kesenjangan dengan Perkotaan? Retrieved Agustus 7, 2023, from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20230706170708-14-452017/mungkinkah-perdesaan-kejar-kesenjangan-dengan-perkotaan>

Tentang Penyusun

IAP2 Indonesia adalah asosiasi anggota internasional yang didirikan pada tahun 2012 dan berkomitmen untuk memajukan praktik partisipasi publik yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengadvokasi dan mempromosikan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, terutama dalam proyek-proyek pembangunan dan lingkungan.

About the Compiler

IAP2 Indonesia is an international member association established in 2012 and committed to advancing the practice of effective and sustainable public participation in Indonesia. Its main objective is to advocate and promote the importance of involving communities in decision-making processes that affect them, especially in development and environmental projects.



iap2indonesia



iap2.or.id



International Association for Public
Participation (IAP2) Indonesia



executive.officer@iap2.or.id



@IAP2_Indonesia



IAP2 Indonesia



IAP2 Indonesia Affiliate



MULA Coworking Space

Jl. T.B Simatupang Kav. 17, Cilandak
Barat, Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12430